

Analisa Peranan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Manokwari

Ayub Tanudy, Jemy Ricardo Parera

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura, Papua, Indonesia

Email: tanudyy@gmail.com, jimmyricardo40@gmail.com

Article Information

Submitted: 04 Mei 2023

Accepted: 09 Mei 2023

Online Publish: 09 Mei 2023

Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui besarnya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Manokwari, (2). Untuk mengetahui besarnya Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah di Kabupaten Manokwari, (3) Untuk mengetahui besarnya Rasio Desentralisasi Fiskal Keuangan Daerah di Kabupaten Manokwari. Rasio kemandirian daerah kabupaten manokwari selama lima tahun terakhir adalah masih sangat kurang tingkat kemandiriannya, dimana tahun 2017 tingkat kemandiriannya adalah 6.40 %, tahun 2018 adalah 9.86 %, tahun 2019 adalah 9.18 %, tahun 2020 adalah sebesar 7.61 %, tahun 2021 adalah sebesar 10.52 %, dengan demikian yang terendah adalah tahun 2017 sebesar 6.40 %, dan yang tertinggi adalah tahun 2021 sebesar 10.52 %. Rasio ketergantungan kabupaten manokwari selama lima tahun terakhir adalah masih sangat tinggi tingkat ketergantungannya, dimana tahun 2017 tingkat kemandiriannya adalah 88.80 %, tahun 2018 adalah 76.59 %, tahun 2019 adalah 86.04 %, tahun 2020 adalah sebesar 83.57 %, tahun 2021 adalah sebesar 84.28 %, dengan demikian yang terendah adalah tahun 2018 sebesar 76.59 %, dan yang tertinggi adalah tahun 2017 sebesar 88.80 %. Rasio kemandirian daerah kabupaten manokwari selama lima tahun terakhir adalah masih sangat kurang tingkat kemandiriannya, dimana tahun 2017 tingkat kemandiriannya adalah 5.56 %, tahun 2018 adalah 7.56 %, tahun 2019 adalah 7.90 %, tahun 2020 adalah sebesar 6.36 %, tahun 2021 adalah sebesar 8.87 %, dengan demikian yang terendah adalah tahun 2017 sebesar 5.56 %, dan yang tertinggi adalah tahun 2021 sebesar 8.87 %

Kata Kunci: Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian, Rasio Ketergantungan, Rasio Desentralisasi Fiskal

Abstract

The use of language in mall public spaces uses more English than Indonesian. The aims of this study were (1) to determine the magnitude of the Regional Financial Independence Ratio in Manokwari Regency, (2). To find out the magnitude of the Regional Financial Dependence Ratio in Manokwari Regency, (3) To find out the magnitude of the Regional Financial Fiscal Decentralization Ratio in Manokwari Regency. The ratio of independence of the Manokwari district over the past five years is still lacking in the level of independence, where in 2017 the level of independence was 6.40%, in 2018 was 9.86%, in 2019 was 9.18%, in 2020 was 7.61%, in 2021 was 10.52%, thus the lowest is in 2017 at 6.40%, and the highest is in 2021 at 10.52%. The dependency ratio of Manokwari district over the past five years is still very high, where in 2017 the level of independence was 88.80%, in 2018 it was 76.59%, in 2019 it was 86.04%, in 2020 it was 83.57%, in 2021 it was 84.28%, with Thus the lowest was 2018 at 76.59%, and the highest was 2017 at 88.80%. The ratio of regional independence in Manokwari district over the past five years is still lacking in the level of independence, where in 2017 the level of independence was 5.56%, in 2018 was 7.56%, in 2019 was 7.90%, in 2020 was 6.36%, in 2021 was 8.87%, thus the lowest is 2017 of 5.56%, and the highest is 2021 of 8.87 %.

Keywords: Blood Financial Independence, Independence Ratio,

How to Cite

DOI
e-ISSN

Published by

Ayub Tanudy, Jemy Ricardo Parera/ Analisa Peranan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Manokwari / Vol 4 No 2 (2023)

<http://dx.doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i2.250>

2721-2246

Rifa Institute

Pendahuluan

Peralihan pemerintahan Orde Baru menjadi pemerintahan Reformasi pada tahun 1998 telah membawa banyak perubahan dalam sistem tata negara dan berbagai kebijakan ekonomi di Indonesia. Era atau masa pemerintahan Reformasi membawa perubahan yang lebih adil dan berimbang dalam berbagai kebijakan. Salah satunya adalah perubahan paradigma melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang direvisi menjadi UU No 32 Tahun 2004 dan juga UU No 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang direvisi menjadi UU No 33 Tahun 2004. Dengan diberlakukannya undang-undang ini maka memberikan kesempatan bagi daerah untuk menggali potensi daerah sehingga dapat mewujudkan kemandirian keuangan daerah (Imawan & Wahyudin, 2014; Indonesia, 1999, 2004; Wasistiono, 2001)

Ciri utama suatu daerah yang dapat melaksanakan otonomi yaitu kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus dapat menggali sumber keuangan yang ada di daerah, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai kegiatan pemerintah dan ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat harus seminimal mungkin agar pendapatan daerah menjadi sumber keuangan (Eko, 2015; Oki et al., 2020; Said & Bakar, 2021; Sembel et al., 2018)

Kabupaten Manokwari merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Papua Barat yang juga merupakan Ibukota Provinsi Papua Barat yang memiliki sumber daya alam yang mampu menciptakan sumber pendapatan yang luas untuk mendorong kemakmuran masyarakat di Kabupaten Manokwari. Selain itu Kabupaten Manokwari juga diberi kewenangan untuk mengatur dan mengololoh sumber pendapatannya sendiri. maka diharapkan Kabupaten Manokwari mampu menggali, mengelola, dan memaksimalkan potensi sumber daya alam yang ada untuk kemajuan dan kemakmuran daerah. Data penerimaan daerah kabupaten manokawari dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Data PAD, Dana Transfer, Total Pendapatan Pemerintah Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2017 – 2021

Tahun	PAD (Rp)	Dana Transfer (Rp)	Total Pendapatan (Rp)
2017	56.042.000.000	875.044.000.000	1.008.075.000.000
2018	90.086.000.000	913.003.000.000	1.191.016.000.000
2019	108.055.000.000	1.177.089.000.000	1.368.091.000.000
2020	84.061.000.000	1.104.033.000.000	1.321.040.000.000
2021	102.069.000.000	970.025.000.000	1.151.010.000.000

(Keuangan, 2022)

Dari tabel di atas dapat dilihat data Penerimaan Asli Daerah (PAD), dana transfer dan total pendapatan pemerintah Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2017-2021. Pada tahun 2017 – 2019, dapat dilihat nilai PAD Kabupaten Manokwari terus mengalami kenaikan hingga mencapai angka Rp 108.055.000.000 pada tahun 2019. Tetapi pada tahun 2020, PAD mengalami penurunan menjadi Rp 84.061.000.000 dan naik kembali menjadi Rp 102.069.000.000. Pada penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pemerintah Kabupaten Manokwari, peranan pemerintah pusat masih tinggi. Ini dapat dilihat dari tingginya dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah dari tahun 2017 – 2021. Dana transfer tahun 2017 – 2021 terus mengalami kenaikan. Sementara pada tahun 2018 menurun menjadi Rp 1.104.033.000.000 dan tahun 2021 menurun menjadi Rp 970.025.000.000. Kenaikan dan

penurunan nilai PAD dan pendapatan transfer juga berpengaruh pada total pendapatan Kabupaten Manokwari. Dimana tahun 2017 – 2019 total pendapatan terus mengalami kenaikan. Sedangkan pada tahun 2020 total pendapatan menurun menjadi Rp 1.321.040.000.000 dan pada tahun 2021 terus mengalami penurunan menjadi Rp 1.151.010.000.000.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung pembiayaan daerah. Daerah yang mampu menggali PAD tentu akan mengalami perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Kemandirian keuangan daerah dapat terwujud dengan peningkatan pertumbuhan PAD. Semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD maka semakin kecil pula ketergantungan daerah pada bantuan dari pemerintah pusat. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Manokwari”.

Metode

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder merupakan data berbentuk angka-angka baik secara langsung dari hasil penelitian yang di proses menggunakan rumus matematika atau dapat juga di analisis dengan sistem statistik.

Sumber data dalam penelitian adalah data Sekunder merupakan sumber data suatu penelitian yang di peroleh peneliti melalui media perantara (di peroleh atau dicatat oleh pihak lain). Data sekunder itu berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data documenter.

Untuk menjawab permasalahan, metode analisis yang digunakan adalah analisis Rasio Kemandirian, Rasio Ketergantungan, Rasio Desentralisasi Fiskal. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio kemandirian adalah: (Mahmudi & Sallama, 2010).

$$1. \text{ Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Transfer Pusat+Provinsi+Pinjaman}} 100\%$$

$$2. \text{ Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

$$3. \text{ Rasio Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Hasil dan Pembahasan

Analisis kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab manokwari dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan dalam bidang keuangan. Rasio yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten manokwari yaitu rasio kemandirian daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah dan rasio desentralisasi fiskal. Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah laporan keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), data dana transfer dan data total PAD Kabupaten Manokwari. Dari data tersebut nantinya dapat memberikan gambaran informasi mengenai kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten manokwari selama kurun waktu 5 tahun terakhir (tahun 2017-2021). Laporan keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Manokwari sebagai berikut:

Tabel 2. Data PAD, Dana Transfer, Total Pendapatan Pemerintah Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2017 – 2021

Tahun	PAD (Rp)	%	Dana Transfer (Rp)	%	Total PAD (Rp)	%
2017	56.042.000.000	-	875.044.000.000	-	1.008.075.000.000	-
2018	90.086.000.000	90.85	913.003.000.000	4.34	1.191.016.000.000	1.191.16
2019	108.055.000.000	108.05	1.177.089.000.000	28.92	1.368.091.000.000	1.368.09
2020	84.061.000.000	84.06	1.104.033.000.000	842.90	1.321.040.000.000	1.321.03
2021	102.069.000.000	102.07	970.025.000.000	121.38	1.151.010.000.000	1.151.00

Dari tabel di atas dapat dilihat perkembangan PAD, Dana Transfer dan Total PAD kabupaten manokwari tahun 2017-2021 di mana tahun 2017 penerimaan PAD sebesar Rp. 56.042.000.000, penerimaan dana transfer sebesar Rp. 875.044.000.000, dan total penerimaan PAD adalah sebesar Rp. 1.008.075.000.000, Tahun 2018 penerimaan PAD sebesar Rp. 90.086.000.000, penerimaan dana transfer sebesar Rp. 913.003.000.000, dan total penerimaan PAD adalah sebesar Rp. 1.191.016.000.000, tahun 2019 penerimaan PAD sebesar Rp. 108.055.000.000, penerimaan dana transfer sebesar Rp. 1.177.089.000.000, dan total penerimaan PAD adalah sebesar Rp. 1.368.091.000.000, tahun 2020 , penerimaan PAD sebesar Rp 84.061.000.000, penerimaan dana transfer sebesar Rp. 1.104.033.000.000, dan total penerimaan PAD adalah sebesar Rp. 1.321.040.000.000, tahun 2021 penerimaan PAD sebesar Rp. 102.069.000.000, penerimaan dana transfer sebesar Rp 970.025.000.000, dan total penerimaan PAD adalah sebesar Rp. 1.151.010.000.000.

Rasio Kemandirian Daerah

Rasio Kemandirian adalah untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode secara mandiri tanpa tergantung dari pemerintah pusat Semakin besar rasio Kemandirian daerah maka kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten manokwari dinyatakan baik. Rasio Kemandirian Keuangan dapat diukur dengan data PAD dan Penerimaan dana transfer sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Trasfer Pusat+Provinsi+Pinjaman}} 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{56.042.000.000}{875.044.000.000} \times 100\% \\ &= 6.40\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{90.086.000.000}{913.003.000.000} \times 100\% \\ &= \underline{9.86\%} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} &= \frac{108.055.000.000}{1.177.089.000.000} \times 100\% \\ &= 9.18\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2020} &= \frac{84.061.000.000}{1.104.033.000.000} \times 100\% \\ &= 7.61\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2021} &= \frac{102.069.000.000}{970.025.000.000} \times 100\% \\ &= \underline{10.52\%} \end{aligned}$$

Dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Manokwari

Tahun	Kemampuan Kemandirian	Kemandirian (%)
2017	Sangat Kurang	6.40
2018	Sangat Kurang	9.86
2019	Sangat Kurang	9.18
2020	Sangat Kurang	7.61
2021	Kurang	10.52

Dari tabel diatas dapat dilihat rasio kemandirian daerah kabupaten manokwari selama lima tahun terakhir adalah masih sangat kurang tingkat kemandiriannya, dimana tahun 2017 tingkat kemandiriannya adalah 6.40 %, tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 9.86 % , tahun 2019 adalah 9.18 %, tahun 2020 turun menjadi 7.61 %, tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 10.52 %, dengan demikian yang terendah adalah tahun 2017 sebesar 6.40 % , dan yang tertinggi adalah tahun 2021 sebesar 10.52 %.

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah adalah untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Semakin besar rasio ketergantungan atau realisasi penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya maka kinerja pemerintah daerah dinyatakan baik. Rasio ketergantungan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tahun 2017 =	$\frac{875.044.000.000}{1.008.075.000.000}$	x 100%
=	88.80 %	
Tahun 2018 =	$\frac{913.003.000.000}{1.192.016.000.000}$	x 100%
=	76.59 %	
Tahun 2019 =	$\frac{1.177.089.000.000}{1.368.091.000.000}$	x 100%
=	86.04%	
Tahun 2020 =	$\frac{1.104.033.000.000}{1.321.040.000.000}$	x 100%
=	83.57 %	
Tahun 2021 =	$\frac{970.025.000.000}{1.151.010.000.000}$	x 100%
=	84.28%	

Dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Rasio Ketergantungan Kabupaten Manokwari

Tahun	Kemampuan Keuangan Daerah	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
2017	Tinggi	88.80	Delegetif
2018	Tinggi	76.59	Delegetif
2019	Tinggi	86.04	Delegetif
2020	Tinggi	83.57	Delegetif
2021	Tinggi	84.28	Delegetif

Sumber: data diolah, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat rasio ketergantungan kabupaten manokwari selama lima tahun terakhir adalah masih sangat tinggi tingkat ketergantungannya, dimana tahun 2017 tingkat kemandiriannya adalah 88.80 %, dengan pola hubungannya adalah delegatif artinya campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah atau sangat delegatif, sementara di tahun 2018 turun menjadi 76.59% dengan pola hubungannya adalah delegatif dengan sendirinya ketergantungan pemerintah kabupaten manokwari sudah cukup baik dalam mengelola keuangan daerahnya sehingga semakin kecil peranan pemerintah pusat atau delegatif, tahun 2019 meningkat lagi menjadi 86.04%, dengan pola hubungannya adalah delegatif artinya dengan pola hubungannya adalah delegatif dengan sendirinya ketergantungan pemerintah kabupaten manokwari sudah cukup baik dalam mengelola keuangan daerahnya sehingga semakin kecil peranan pemerintah pusat atau delegatif, tahun 2020 adalah sebesar turun pada angka 83.57%, dengan pola hubungannya adalah delegatif dengan pola hubungannya adalah delegatif dengan sendirinya ketergantungan pemerintah kabupaten manokwari sudah cukup baik dalam mengelola keuangan daerahnya sehingga semakin kecil peranan pemerintah pusat atau delegatif, tahun 2021 naik menjadi 84.28%, dengan pola hubungannya adalah delegatif dengan pola hubungannya adalah delegatif dengan sendirinya ketergantungan pemerintah kabupaten manokwari sudah cukup baik dalam mengelola keuangan daerahnya sehingga semakin kecil peranan pemerintah pusat atau delegatif, dengan demikian rasio ketergantungan kabupaten manokwari yang terendah adalah tahun 2018 sebesar 76.59%, dan yang tertinggi adalah tahun 2017 sebesar 88.80%.

Rasio Desentralisasi Fiskal

Rasio desentralisasi fiskal mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan dan mengeloa kinerja fiskal yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Semakin besar rasio desentralisasi fiskal atau realisasi penerimaan fiskal daerah tahun sebelumnya maka kinerja pemerintah daerah dinyatakan baik. pertumbuhan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{56.042.000.000}{1.008.075.000.000} \times 100\% \\ &= 5.56 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{90.086.000.000}{1.192.016.000.000} \times 100\% \\ &= 7.56 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Tahun 2019} &= \frac{108.055.000.000}{1.368.091.000.000} \times 100\% \\
 &= 7.90 \% \\
 \text{Tahun 2020} &= \frac{84.061.000.000}{1.008.075.000.000} \times 100\% \\
 &= 6.36 \% \\
 \text{Tahun 2021} &= \frac{102.069.000.000}{1.151.010.000.000} \times 100\% \\
 &= 8.87 \%
 \end{aligned}$$

Dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5. Rasio Desentralisasi Fiskal Kabupaten Manokwari

Tahun	Kemampuan Kinerja Keuangan	Kemandirian (%)
2017	Sangat Kurang	5.56
2018	Sangat Kurang	7.56
2019	Sangat Kurang	7.90
2020	Sangat Kurang	6.36
2021	Sangat Kurang	8.87

Sumber: data diolah, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat rasio desentralisasi fiskal kabupaten manokwari selama lima tahun terakhir adalah masih sangat kurang tingkat kemandiriannya, dimana tahun 2017 tingkat kemandiriannya adalah 5.56 %, tahun 2018 naik menjadi 7.56 %, tahun 2019 naik juga sebesar 7.90 %, tahun 2020 turun menjadi 6.36 %, tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 8.87 %, dengan demikian yang terendah adalah tahun 2017 sebesar 5.56 %, dan yang tertinggi adalah tahun 2021 sebesar 8.87 %. Dan selama lima tahun terakhir rasio kemandirian daerah kabupaten manokwari bersifat sangat kurang dalam mengelola desentralisasi fiskal daerahnya.

Analisis hasil penelitian ini kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten manokwari dalam mengelola keuangan. Rasio yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten manokwari. Dari hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan gambaran informasi mengenai kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten manokwari selama kurun waktu 5 tahun terakhir (tahun 2017-2021). Laporan keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Manokwari sebagai berikut:

Tabel 6 Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2017 – 2021

Tahun	Rasio Kemandirian Daerah (%)	Kemampuan Kemandirian	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (%)	Kemampuan Keuangan Daerah	Rasio Desentralisasi Fiskal (%)	Kemampuan Kinerja Keuangan Daerah
-------	------------------------------	-----------------------	--	---------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

2017	6.40	Sangat Kurang	88.80	Tinggi	5.56	Sangat Kurang
2018	9.86	Sangat Kurang	76.59	Tinggi	7.56	Sangat Kurang
2019	9.18	Sangat Kurang	86.04	Tinggi	7.90	Sangat Kurang
2020	7.61	Sangat Kurang	83.57	Tinggi	6.36	Sangat Kurang
2021	10.52	Kurang	84.28	Tinggi	8.87	Sangat Kurang

Sumber: Data diolah, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat rasio kemandirian daerah kabupaten manokwari selama lima tahun terakhir adalah masih sangat kurang tingkat kemandiriannya, dimana tahun 2017 tingkat rasio kemandiriannya adalah 6.40 %, dengan kemampuan kemandirian masih sangat kurang, dan untuk rasio ketergantungannya sebesar 88.80 %, dengan kemampuan keuangan daerah masih sangat tinggi, dan untuk rasio desentralisasi fiskal sebesar 5.56 % dengan kemampuan keuangan daerah masih sangat kurang, untuk tahun 2018 tingkat rasio kemandiriannya adalah 9.86 %, dengan kemampuan kemandirian masih sangat kurang, dan untuk rasio ketergantungannya sebesar 76.59 %, dengan kemampuan keuangan daerah masih sangat tinggi, dan untuk rasio desentralisasi fiskal sebesar 7.56 % dengan kemampuan keuangan daerah masih sangat kurang, untuk tahun 2019 tingkat rasio kemandiriannya adalah 9.18 %, dengan kemampuan kemandirian masih sangat kurang, dan untuk rasio ketergantungannya sebesar 86.04 %, dengan kemampuan keuangan daerah masih sangat tinggi, dan untuk rasio desentralisasi fiskal sebesar 7.90 % dengan kemampuan keuangan daerah masih sangat kurang, untuk tahun 2020 tingkat rasio kemandiriannya adalah 7.61 %, dengan kemampuan kemandirian masih sangat kurang, dan untuk rasio ketergantungannya sebesar 83.57 %, dengan kemampuan keuangan daerah masih sangat tinggi, dan untuk rasio desentralisasi fiskal sebesar 6.36 % dengan kemampuan keuangan daerah masih sangat kurang, untuk tahun 2021 tingkat rasio kemandiriannya adalah 10.52 %, dengan kemampuan kemandirian masih sangat kurang, dan untuk rasio ketergantungannya sebesar 84.28 %, dengan kemampuan keuangan daerah masih sangat tinggi, dan untuk rasio desentralisasi fiskal sebesar 8.87 % dengan kemampuan keuangan daerah masih sangat kurang.

Kesimpulan

Rasio kemandirian daerah kabupaten manokwari selama lima tahun terakhir adalah masih sangat kurang tingkat kemandiriannya, dimana tahun 2017 tingkat kemandiriannya adalah 6.40 %, tahun 2018 adalah 9.86 %, tahun 2019 adalah 9.18 %, tahun 2020 adalah sebesar 7.61 %, tahun 2021 adalah sebesar 10.52 %, dengan demikian yang terendah adalah tahun 2017 sebesar 6.40 %, dan yang tertinggi adalah tahun 2021 sebesar 10.52 %. Rasio ketergantungan kabupaten manokwari selama lima tahun terakhir adalah masih sangat tinggi tingkat ketergantungannya, dimana tahun 2017 tingkat kemandiriannya adalah 88.80 %, tahun 2018 adalah 76.59 %, tahun 2019 adalah 86.04 %, tahun 2020 adalah sebesar 83.57 %, tahun 2021 adalah sebesar 84.28 %, dengan demikian yang terendah adalah tahun 2018 sebesar 76.59 %, dan yang tertinggi adalah tahun 2017 sebesar 88.80 %. Rasio desentralisasi fiskal kabupaten manokwari selama lima tahun terakhir adalah masih sangat kurang tingkat kemandiriannya, dimana tahun 2017 tingkat kemandiriannya adalah 5.56 %, tahun 2018 naik menjadi 7.56 % , tahun 2019 naik juga sebesar 7.90 %, tahun 2020 turun menjadi 6.36 %,

tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 8.87%, dengan demikian yang terendah adalah tahun 2017 sebesar 5.56% , dan yang tertinggi adalah tahun 2021 sebesar 8.87 %. Dan selama lima tahun terakhir rasio kemandirian daerah kabupaten manokwari bersifat sangat kurang dalam mengelola desentralisasi fiskal daerahnya

BIBLIOGRAFI

- Eko, S. (2015). *Regulasi Baru, Desa Baru: Ide, Misi, dan Semangat UU Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi.
- Imawan, R., & Wahyudin, A. (2014). Analisis kemandirian keuangan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2010-2012. *Accounting Analysis Journal*, 3(2).
- Indonesia, R. (1999). *UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta.
- Indonesia, R. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. *Jakarta (ID): RI*.
- Kuangan, D. J. P. (2022). *APBD Kabupaten Manokwari*. Djpk.Kemenkeu.Go.Id. djpk.kemenkeu.go.id
- Mahmudi, M., & Sallama, N. (2010). Manajemen keuangan daerah. *Jakarta: Erlangga*.
- Oki, K. K., Nalle, F. W., & Meomanu, P. A. V. (2020). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Belu. *Ekopem: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2(2), 1–6.
- Said, S. W., & Bakar, A. (2021). Analisis Tingkat Kemandirian, Efektivitas Dan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Mimika. *JURNAL KRITIS (Kebijakan, Riset, Dan Inovasi)*, 5(2), 1–20.
- Sembel, R., Gosal, R., & Sondakh, E. (2018). EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA WATULINEY INDAH KECAMATAN BELANG KABUPATEN MINAHASA TENGGARA. *JURNAL EKSEKUTIF*, 1(1).
- Wasistiono, S. (2001). *Esensi UU no. 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah: bunga rampai*. Alqaprint Jatinangor.

Copyright holder:

Ayub Tanudy, Jemy Ricardo Parera (2023)

First publication right:

Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan

This article is licensed under:

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

